

Judul : Pelayanan publik wajib tetap berjalan
Tanggal : Kamis, 26 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Wacana Kebijakan WFH

Pelayanan Publik Wajib Tetap Berjalan

ANGGOTA Komisi II DPR Ujang Bey menyoroti penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH). Aturan yang berlaku bagi aparat sipil negara (ASN) dan sektor swasta harus dirancang secara matang agar tujuan tercapai tanpa mempengaruhi kinerja.

Ujang mengapresiasi langkah Pemerintah mendorong WFH sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional. Namun, implementasi kebijakan itu harus berbasis data serta perencanaan yang jelas agar target penghematan dapat terukur. Untuk itu, sinergi antara pusat dan daerah jadi kunci utama.

Pemerintah harus menentukan jumlah ASN maupun pegawai swasta yang akan menjalani WFH serta durasi pelaksanaannya. Data mengenai instansi, kementerian, serta perusahaan swasta yang terdampak harus segera dipetakan. "Jawaban atas pertanyaan itu akan menunjukkan angka pasti besaran BBM yang dapat dihemat nantinya," katanya, kemarin.

Ujang menyoroti potensi dampak kebijakan itu terhadap operasional sektor swasta yang memiliki target kinerja ketat. Penerapan WFH tidak boleh mengganggu stabilitas perusahaan atau produktivitas ekonomi. Koordinasi yang baik dengan pelaku usaha yang terdampak harus dilakukan agar

tidak muncul kendala dalam implementasi di lapangan.

Senada, anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan, kebijakan ini memerlukan mitigasi komprehensif berbasis efektivitas dan efisiensi. Pemerintah harus mengkaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh dengan memperhatikan layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pengalaman Indonesia pada masa Covid-19 jadi data dan bahan dalam merumuskan kebijakan ini. "Kebijakan WFH mesti didasari pada data konkret di lapangan, mulai soal demografi, efektivitas kebijakan, serta pertimbangan ekonomi masyarakat setempat," ingatnya.

Dia menegaskan, kebijakan yang akan ditempuh tidak boleh hanya mempertimbangkan satu aspek saja. Contohnya soal rencana penerapan satu hari WFH dalam sepekan, yang dinilai tidak memiliki dampak signifikan pada penghematan BBM. "Jadi, multiaspek mesti dijadikan rujukan dalam penerbitan kebijakan WFH ini," katanya.

Khozin menyebut, situasi saat ini jadi momentum tepat untuk mendesain transportasi publik yang baik dan efektif di daerah. Jika ASN dan swasta bisa menggunakan transportasi publik secara optimal, maka akan berdampak signifikan dalam kon-



Ujang Bey

sumsi BBM. Karena itu, Pemda mesti mendesain transportasi umum yang aman dan nyaman.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf Macan Effendi menambahkan, penerapan WFH tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik. Konsep kerja fleksibel bisa berjalan efektif selama indikator kinerja utama tetap tercapai dengan baik. Keseimbangan antara efisiensi energi dan tanggung jawab kerja tetap jadi prioritas.

Pengalaman penerapan WFH di Jawa Barat menunjukkan hasil yang cukup efisien dalam berbagai aspek kerja. Meski demikian, pelayanan publik secara fisik tidak boleh terhambat oleh adanya sistem kerja jarak jauh tersebut. Petugas piket harus tetap tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat secara

langsung dan optimal.

Dede juga menekankan pengawasan ketat terhadap pegawai yang sedang menjalankan tugas dari rumah masing-masing. Tanpa kontrol kuat, kebijakan itu berisiko gagal mencapai tujuan penghematan energi jika pegawai justru lebih sering bepergian. "Kedisiplinan ASN harus tetap terjaga meski tidak berada di kantor secara fisik," katanya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, wacana ini muncul bukan karena masalah pasokan BBM di dalam negeri. Stok energi dipastikan berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat luas. Kebijakan itu murni diambil sebagai strategi penghematan serta efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia saat ini.

Salah satu opsi yang sedang dikaji, kata dia, pemberlakuan WFH setidaknya satu hari dalam seminggu bagi ASN. Langkah itu diharap mampu mengurangi mobilitas kendaraan di jalan raya sehingga penggunaan BBM menurun. "Pemerintah terus menyempurnakan draf regulasi agar pelaksanaannya tidak menuai kendala teknis," ungkapnya.

Kebijakan itu belum final karena masih digodok kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah akan memilah sektor mana saja yang memungkinkan untuk

menerapkan skema kerja jarak jauh. Sektor pelayanan, industri, serta perdagangan kemungkinan besar tidak jadi bagian dari kebijakan pembatasan mobilitas fisik itu.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kebijakan *work from anywhere* (WFA) usai libur Lebaran berpotensi besar menekan konsumsi BBM. Pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA pada 25 hingga 27 Maret 2026 sebagai uji coba efisiensi. Hasil hitungan kasar menunjukkan potensi penghematan yang cukup besar bagi negara.

Penurunan konsumsi BBM selama masa WFA diperkirakan bisa mencapai angka sekitar 20 persen dari total harian. Meskipun hanya hitungan awal, tren itu menunjukkan dampak positif bagi ketahanan energi nasional. Penyesuaian pola kerja baru itu diyakini jadi solusi efektif di tengah tantangan kondisi ekonomi global.

Selain penghematan energi, kebijakan WFA juga diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi di berbagai wilayah. Pariwisata berpeluang tumbuh karena masyarakat memiliki waktu lebih fleksibel dalam melakukan perjalanan sambil bekerja. "Dampak domino ekonomi itu diharapkan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha lokal di daerah wisata," katanya. ■ PYB